

http://kabar-banten.com/news/detail/14045

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

BERSAMA DIREKTORAT TEKNIS PERHUBUNGAN, BPK SELIDIKI KASUS DERMAGA MERAK

Tuesday, 30 Jul 2013 | 01:36:13 WIB

MERAK, (KB) - Direktorat Teknis Perhubungan Darat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selidiki ambruknya Dermaga 5 Pelabuhan Penyeberangan Merak. Dermaga 5 yang dibangun 2009-2010 oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry itu, diduga akibat konstruksinya tidak memenuhi prosedur.

Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Merak, Andi Prasetyo mengaku, pihaknya akan melihat dokumen rancangan pembangunan dermaga yang ambruk tersebut. Ambruknya dermaga 5, telah sampai ke pemerintah pusat. Untuk itu, petugas Direktorat Teknis Perhubungan Darat segera turun memeriksa ambruknya dermaga tersebut.

"Secara kasat mata memang ada prosedur yang kurang memenuhi, seperti baut moveable bridge (MB) yang terlalu kecil bila dibandingkan dermaga lainnya. Pasti semua pihak mengarah ke arah prosedur. Namun, kami tunggu saja hasil penyidikannya saja," kata Andi Prasetyo.

Untuk memeriksa konstruksi pembangunannya, kata dia, tentu ada pada dokumennya untuk memastikan memenuhi prosedur atau tidak. Selain direktorat teknis, ungkap dia, informasinya BPK juga akan ikut memeriksa.

Ia menjelaskan, dermaga 5 memiliki arus laut yang cukup kencang bila dibandingkan dengan dermaga lainnya. Seharusnya, perlu konstruksi yang benar dan baik.

Perlu proses

Direkskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan data dan bahan keterangan untuk mengetahui ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam peristiwa tersebut.

"Sabar, kami kan baru pulbaket, menentukan apakah ada tipikor atau tidak kan perlu proses," kata Wahyu, melalui pesan singkatnya, Senin (29/7).

Wahyu juga menjelaskan, pihaknya tidak bisa menduga-duga menyangkut material dermaga. Menurut dia, pihaknya hanya berbicara fakta hukum.

"Kami tidak bisa berbicara menduga-duga, kami bicara fakta hukumnya seperti apa," katanya. (H-37/H-42)***

Dibaca : 117 kali

Facebook Twitter Share Email Print

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5, 12, 19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO THE GREAT SCREEN
www.kabarpaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isha	18:55

kabar banten kabar Banten Kritis ... kabar banten juli - ... 1:58 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/14041

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

HIBAH SHOLATIYAH MASUK TEMUAN LHP BPK

Tuesday, 30 Jul 2013 | 01:37:26 WIB

SERANG, (KB)- Hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sholatiyah senilai Rp600 juta menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. BPK menilai, YPI Asholatiyah tidak bertanggungjawabkan penggunaan dana hibah tersebut.

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten No. 7b/LHP/XVIII.SRG/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 terungkap bahwa YPI Sholatiyah mendapatkan hibah Rp600 juta berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 466/Kep.43-Huk/2012 dan diterima pada tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan SP2D No. 900/KEU-000393/LS.P.1/2012.

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 466/22-Huk/2012 yang ditandatangani ES dari Pemrov Banten dan AR dari SPI Sholatiyah, pemberian hibah bertujuan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Pusat Kegiatan dan Pengembangan YPI Sholatiyah dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan.

Menurut laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut yang ditandatangani AR, diketahui bahwa dana hibah itu digunakan untuk membiayai enam jenis kegiatan, yaitu latihan kepemimpinan dan kewirausahaan Rp100,352 juta, pelatihan peningkatan kualitas guru Rp100,815 juta, pelatihan pembinaan mubaligh muda Rp97,703 juta, pelatihan life skill guru mata pelajaran 97,775 juta, workshop diskriminasi pendidikan Rp99,825 juta dan pelatihan administrasi sekolah Rp100,530 juta.

Namun, setelah BPK melakukan pengujian atas kebenaran pelaksanaan kegiatan tersebut, ditemukan bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak pernah ada, bukti pengeluaran atas nama AA, bendahara lembaga tandatangannya tidak sama dan tanda tangan peserta pada setiap kegiatan dinyatakan hampir sama pada daftar hadir dan diduga hasil rekayasa.

Atas dasar hal tersebut, BPK menyimpulkan kegiatan yang disampaikan AR tidak dapat diyakini keterjadiannya, AR tidak dapat membuktikan dokumen pendukung kegiatan seperti foto atau video rekaman kegiatan, kaos dan modal kegiatan dan keberadaan YPI Asholatiyah sendiri dinyatakan bukan organisasi yang resmi dan nyata di YPI Sholatiyah.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemrov Banten untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dan meminta kepada pengurus YPI Sholatiyah untuk bertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya sebesar Rp600 juta dengan menyertor ke kas daerah.

Kepala Biro Kesra Pemrov Banten Mashuri saat dikonfirmasi membenarkan adanya temuan BPK tersebut. Ia menyatakan, pihaknya telah meminta pihak YPI Sholatiyah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut. "Untuk tindaklanjuti teknisnya, Inspektorat akan mengirimkan surat ke YPI Sholatiyah terkait temuan tersebut," ucapnya. (H-32)***

TERKAIT

- Usut Tuntas Kasus Dana Hibah
- Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat Pemrov S...
- Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten 2011, Eks...
- Kasus YPI Sholatiyah Belum Ada Tersangka
- Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200 Juta Ma...

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5, 12, 19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO THE THEATRE
www.kabar-banten.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/14001

KABAR BANTEN.com
Grup Pikiran Rakyat

BKS
BINA BINA MARGA
Perencanaan - Digital Printing - Advertising

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

TEMUAN LHP BPK, SKPD DIMINTA KOOPERATIF

Friday, 26 Jul 2013 | 21:09:12 WIB

SERANG, (KB)-
Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin meminta kepala SKPD yang ada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kooperatif saat diundang mitra komisi. Pasalnya, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi agar temuan tersebut diselesaikan.

Permintaan tersebut disampaikan Aeng menyikapinya adanya kepala SKPD yang diundang oleh komisi tidak hadir. Ia menuturkan, DPRD Banten merupakan lembaga yang sangat memiliki kewenangan membahas temuan-temuan yang tertuang dalam LHP BPK 2012 untuk kemudian dibuatkan rekomendasi.

"Saya dengar ada salah seorang kepala dinas yang sulit jika diundang untuk rapat kerja. Tidak hanya membahas soal LHP BPK, tapi terkait rapat kerja evaluasi program juga demikian. Jika terus demikian, tentu kami bisa melakukan pemanggilan kepada sekda," kata Aeng, Kamis (25/7).

Ia mengungkapkan, berdasarkan LHP BPK, ada sejumlah dinas yang temuannya cukup mencengangkan terkait indikasi kerugian negara. Ia menyebut beberapa di antaranya yakni, Dinas Kesehatan, Biro Umum dan Aset, serta Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR).

Aeng mengkhawatirkan, jika SKPD tak kooperatif bersama-sama membahas LHP BPK 2012 maka akan menjadi permasalahan baru. Terutama bagi SKPD yang banyak temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Pasalnya, aparat penegak hukum sudah meminta LHP BPK.

"Mereka ingin sama-sama mencermati LHP BPK tersebut jika memang ada yang terindikasi merugikan keuangan negara, akan ada pemeriksaan khusus," ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Komisi IV Asep Rahmatullah menyatakan, Komisi IV sudah mengundang Kepala DBMTR Sutadi untuk membahas temuan LHP BPK. Namun demikian, yang bersangkutan tidak hadir. Hal senada disampaikan anggota Komisi IV Sabrawijaya. Menurut dia, karena pertemuan tidak dihadiri kepala DBMTR maka pembahasan terkait temuan LHP BPK dianggap belum dilakukan.

Seperi diketahui, dalam LHP BPK atas LKP Pemprov Banten 2012 ada 12 temuan yang berkaitan ketidakpatuhan perundang-undangan dan 10 temuan ketidakpatuhan pengendalian sistem intern. Sejumlah temuan tersebut yakni, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kontrak, kekurangan volume pekerjaan, praktik-praktik pemalahan harga pengadaan barang dan jasa. (H-32)***

TERKAIT

- > Iman Minta SKPD Proaktif
- > Pejabat Baru Dituntut Selesaikan Temuan
- > Inspektorat Kumpulan SKPD
- > Realistis, Usulan Anggaran SKPD
- > SKPD Mulai Dipisahkan Proposal THR



Kabar Banten ePaper



Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

Dibaca : 134 kali

1:57 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/13881

KABAR BANTEN.com
Grup Pikiran Rakyat

BKS
BINA WISATA BANTEN KE BANGSA
Perencanaan - Digital Printing - Advertising

Menyajikan: BANTEN, SERANG, PANDEGLANG, LEBAK, TANGERANG, HALAMAN UTAMA, OLAHRAGA, PENDIDIKAN, KOMUNITAS, INDEX

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

DUA TERSANGKA KASUS BETONISASI

Wednesday, 24 Jul 2013 | 00:07:49 WIB

SERANG, (KB)-
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Feri Wibisono angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan betonisasi di Jalan Terate, Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang sepanjang 900 meter dari dana APBD 2011 senilai Rp3,5 miliar. Feri menyebutkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus tersebut.

"Tersangkanya sudah, tapi belum bisa saya sampaikan ke publik karena ada beberapa alternatif yang harus diidentifikasi. Ada dua tersangka. Akan tetapi, itu nanti setelah ada kepastian mengenai nilai kerugiannya akan disampaikan," kata Feri, saat jumpa pers tentang laporan kinerja Kejati Banten, di Aula Kejati, Senin (22/7).

Dalam kesempatan itu, Feri mengakui, perkara tersebut merupakan kasus lama yang menarik perhatiannya. "Ya, kasus Terate itu menarik perhatian sampai saya datang ke sana (Kejari Serang-red) untuk ekspos tentang apa yang sudah dan akan dilakukan," ungkapnya.

Feri mengatakan, dalam penanganan kasus tersebut penyidik memang mengalami kendala bukan hanya di BPKP saja. "BPKP sekarang sudah mulai menghitung. Kami juga paham karena BPKP itu kan juga menangani beberapa perkara di tempat lain," tuturnya.

Perdebatan metodologi
Kendala yang dimaksud adalah adanya perdebatan mengenai metodologi perhitungan fisik. "Ada problematika berkaitan dengan metodologi perhitungan fisik. Kemudian, ada beberapa pengembangan termasuk kemarin penggeledahan. Jadi, kami bukan diam saja. Sedang dilakukan pengkajian," ungkapnya.

Feri menambahkan, pada awal penanganan perkara ini mengacu pada temuan empat penyimpangan. Kemudian setelah didalami tersisa dua penyimpangan. "Menurut kami kasus ini penting untuk diselesaikan," ujarnya.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Feri mengungkapkan, perkara-perkara yang tengah ditangani jajaran Kejati Banten, mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. (H-42)***

TERKAIT

- > Dewan Perketat Pengawasan Jalan
- > Tak Punya Panti Sosial, Penanganan Anjal tak Maks...
- > Proyek Betonisasi Jalan Cipacung-Saketi, Warga Pe...
- > Pengerjaan Jalan Palima-Teneng Terhenti
- > Kasus Tanjung Lesung-Sumur, Kejati Tunggu BPK



Kabar Banten ePaper



Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

Dibaca : 135 kali

1:57 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/13847

KABAR BANTEN.com
Grup Pikiran Rakyat

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

DIDUGA KORUPSI DANA BANSOS, CAMAT DAN KADES JADI TERSANGKA

Monday, 22 Jul 2013 | 20:15:28 WIB

PANDEGLANG, (KB) - Tim penyidik Polres Pandeglang menetapkan oknum Camat Sobang, Ac, dan oknum Kepala Desa (Kades) Pangkalan, Su sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) puting belulang di Kecamatan Sobang Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp100 juta.

"Saat ini, oknum Camat Sobang dan oknum Kades Pangkalan sudah kami letakkan sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dana bansos puting belulang. Bahkan, beberapa waktu lalu surat penetapan kedua tersangka sudah kami layangkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatresrim) Polres Pandeglang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bagus Suryo Wibowo, Senin (22/7).

AKP Bagus mengatakan, penetapan kedua tersangka ini didasari atas tiga alat bukti yang sudah mencukupi. Dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi, kuat dugaan kedua tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum, memotong dana bansos yang seharusnya diterima utuh oleh warga penerima bantuan.

"Jadi, dana bansos itu diserahkan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah atau diserahkan tidak utuh kepada warga penerima," katanya.

Tersangka baru

Menurut AKP Bagus, meski sudah menetapkan tersangka, pihaknya masih akan terus mengembangkan kasus tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Dalam penyelidikan kemungkinan adanya tersangka baru bisa saja terjadi bergantung dari hasil proses pengembangan nanti.

"Kami masih terus mengembangkan kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," katanya.

Ia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan Rp100 juta, dari realisasi bansos di Kecamatan Sobang Rp300 juta.

Dalam kasus ini, kedua tersangka diduga melanggar hukum terkait Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal kurungan penjara seumur hidup.

Tidak sesuai

Sementara ditemui terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidus) Kejari Pandeglang, Herya Sakti Saad, SH membenarkan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari tim penyidik Polres Pandeglang mengenai adanya penetapan dua tersangka dalam kasus tersebut.

"Ya, beberapa waktu lalu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari penyidik polres sudah kami terima," kata Arya.

Sekadar diketahui, tahun 2012 beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terkena bencana alam puting belulang, termasuk Kecamatan Sobang menerima dana bansos dari pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai ratusan juta rupiah. Nilai besaran dana yang diterima warga bervariasi disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumahnya. Akan tetapi, di Kecamatan Sobang realisasi pemberian dana kepada penerima korban bencana, tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak utuh. (H-35)***

http://www.epaper.kabar-banten.com/

Dibaca : 276 kali

1:57 PM



Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

DIDUGA KORUPSI DANA BANSOS, CAMAT DAN KADES JADI TERSANGKA

Monday, 22 Jul 2013 | 20:15:28 WIB

PANDEGLANG, (KB) - Tim penyidik Polres Pandeglang menetapkan oknum Camat Sobang, Ac, dan oknum Kepala Desa (Kades) Pangkalan, Su sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) puting belulang di Kecamatan Sobang Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp100 juta.

"Saat ini, oknum Camat Sobang dan oknum Kades Pangkalan sudah kami letakkan sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dana bansos puting belulang. Bahkan, beberapa waktu lalu surat penetapan kedua tersangka sudah kami layangkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatresrim) Polres Pandeglang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bagus Suryo Wibowo, Senin (22/7).

AKP Bagus mengatakan, penetapan kedua tersangka ini didasari atas tiga alat bukti yang sudah mencukupi. Dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi, kuat dugaan kedua tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum, memotong dana bansos yang seharusnya diterima utuh oleh warga penerima bantuan.

"Jadi, dana bansos itu diserahkan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah atau diserahkan tidak utuh kepada warga penerima," katanya.

- TERKAIT**
- Dugaan Korupsi Dana Bansos, Penyidik Poin Segera...
 - Hari Anti Kemiskinan, LMND Buka Posko Bantuan Sosis...
 - Pemkab Pandeglang Salurkan Bansos Dugaan Korupsi Bansos Puting Belulang, Penyidik B...
 - Bansos Rawan Penyelewengan



Kabar-Banten ePaper



Jadwal Sholat Sumber: POCU | 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isha	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/13824

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

BANSOS RAWAN PENYELEWENGAN

Sunday, 21 Jul 2013 | 21:01:50 WIB

JAKARTA, (KSI) - Pengucuran dana melalui anggaran bantuan sosial (bansos) selama ini tidak jelas satuan kerja yang bertanggung jawab. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dana bansos, menunjukkan adanya perencanaan yang tidak benar sehingga pada pelaksanaannya rawan penyelewengan.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan, kajian KPK menunjukkan perencanaan dana bansos di berbagai daerah tidak melalui prosedur yang wajar. "Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diberi tanggung jawab tidak jelas. Dana bansos itu hanya dititipkan saja. Padahal, harus jelas siapa pengguna anggarannya, kuasa pengguna anggaran siapa, pejabat pembuat komitmen siapa," ujarnya.

Dititipkan

Menurut dia, dana bansos seolah hanya dititipkan kepada SKPD. Itulah alasan mengapa dana bansos bisa tersebar di berbagai dinas. Tidak ada SKPD tertentu yang benar-benar bertanggung jawab atas dana bansos. "Istilah bantuan sosial, ya sudah masukkan saja ke dinas sosial," katanya.

Ia mengatakan, proses pengucuran dana bansos sudah tidak wajar dari awal. Proses penatapannya cenderung berupa negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Setelah disetujui tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Setelah disalurkan pun akuntabilitasnya rendah. "Mengingat tidak jelas, akhirnya ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dadakan itu," katanya.

Potensi korupsi

Persoalan dana bansos menjadi salah satu potensi korupsi di pemerintah daerah selain pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, bansos tidak hanya menjadi persoalan di pemerintah daerah. Kajian KPK menunjukkan, pengucuran dana bansos juga bermasalah di tingkat kementerian.

"Studi KPK soal bansos itu tidak hanya di pemda, tapi juga kementerian. Di sana juga terjadi penyimpangan bantuan," ungkapnya.

KPK saat ini sedang menyidik kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam penanganan perkara bansos. Wakil Ketua PN Bandung yang juga hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Setyabudi Tedjocahyono ditangkap KPK setelah menerima suap dari Asep Triana, anak buah Toto Hutagalung, pimpinan omas di Bandung.

Ia mengaku, diperintahkan menyerahkan uang dari Herry Nurhayat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Bekasangan KPK menyalahkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung, Edi Siswadi sebagai tersangka karena dinilai menjadi bagian dari penyusunan itu.

Bambang mengatakan, kasus ini tergolong menggunakan modus yang baru. Pencairan dana bansos yang menjadi perkara hukum di pengadilan kemudian diselesaikan dengan menyuap hakim. Uang suap juga diambil dari dana bansos.

"Kasus ini menggunakan uang bansos itu untuk menyuap. Baru juga seperti itu," ujarnya.

Ia mengatakan, uang suap yang diberikan kepada hakim itu kata Bambang, berasal dari tiga sumber. Selain dari dana bansos, suap berasal patungan pejabat di lingkungan Pemkot Bandung, dan diaku sebagai pinjaman dari pihak ketiga. (A-170/A-147)***

Dibaca : 145 kali

Facebook Twitter Share Email Print

Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda

Nama

http://kabar-banten.com/news/detail/15519

TERKAIT

- Dugaan Korupsi Dana Bansos, Penyidik Poin Segera...
- Hari Anti Kemiskinan, LMND Buka Posko Bantuan Sosi...
- Pembah Pandeglang Salurkan Bansos
- Dugaan Korupsi Bansos Puting Belung, Penyidik Be...
- Diduga Korupsi Dana Bansos, Camat dan Kades Jadi T...




Jadwal Sholat

Sabtu	24 Oct 2013
Sabuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Ihya	18:55

1:57 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/13745

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

DUA TERSANGKA KASUS KORUPSI SAMSAT LEBAK DITAHAN

Thursday, 18 Jul 2013 | 20:38:07 WIB

SERANG, (KB)-

Dua tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan setoran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBNKB) R2 di UPT Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKD Banten senilai Rp1,7 miliar tahun 2009-2011, DFS dan KS dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Serang, Kamis (18/7).

Penahanan keduanya menyusul pelimpahan tahap dua dari Ditreskrimsus Polda Banten ke Kejati Banten. Selain dua tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua tersangka sebelumnya ditahan di Rutan Polda Banten. Kedua tersangka didampingi penyidik tiba di Kejati Banten sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka langsung masuk ke ruangan Kasi Penuntutan untuk menjalani proses administrasi. Selanjutnya, keduanya dibawa ke kejadi untuk proses pemeriksaan.

"Ya, tersangka ditahan di Rutan Serang," ujar Kasi Penuntutan Kejati Banten, Moch. Mahmud, dihubungi melalui ponselnya, Kamis (18/7).

Berkas terpisah

Mahmud mengatakan, kedua tersangka dijerat dan diancam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 atau pasal 8 dan pasal 18 Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Berkas perkaranya terpisah. DFS itu kasir di UPT Rangkasbitung DPKAD Banten, dan KS operator," katanya. Terpisah, Direktur Krimsus Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada, dikonfirmasi membenarkan pelimpahan tahap dua kasus Samsat Lebak. "Ya, sudah limpah tadi anggota berangkat ke kejaksanaan," katanya. Untuk diketahui, kasus tersebut mulai diselidiki sejak Juli 2012. Hasil penyelidikan, ditemukan adanya ketidaksamaan antara data pendaftaran kendaraan baru dengan penerimaan uang ke Kas Daerah Provinsi Banten.

Hasilnya, ditemukan 1.085 kendaraan bermotor baru R2 yang BBNKB-nya tidak dimasukkan ke Kas Daerah periode September 2009-Desember 2011 oleh tersangka DFS selaku Kasir di UPT Rangkasbitung DPKAD Banten. Dalam aksinya, DSF dibantu seorang operator yakni KS. (H-42)***

Dibaca : 196 kali

Kabar-Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5.12.19 & 20 OKTOBER 2019
COMING SOON TO THE THEATRE
www.kabarpaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isha	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/13719

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

TERMASUK BANSOS, PENYALURAN HIBAH JANGAN FIKTIF

Wednesday, 17 Jul 2013 | 20:28:36 WIB

SERANG, (KB)-
 Komisi V DPRD Banten tidak membantah adanya dugaan beberapa pemberian hibah yang salah sasaran atau penerimanya fiktif. Hal ini terbukti beberapa pemberian hibah yang kini sedang diproses hukum.
 "Untuk itu, Komisi V DPRD meminta mekanisme penyaluran hibah supaya benar dan tepat sasaran," kata Ketua Komisi V DPRD Banten, Mediawarman di Serang, Rabu (17/7).
 Ia meminta kepada SKPD di Provinsi Banten untuk memperketat mekanisme penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
 "Kami melakukan pengawasan secara umum saja, karena tidak mungkin satu per satu dari ribuan penerima hibah itu. Secara teknis ada di SKPD bersangkutan," katanya.
 Menurut dia, mekanisme pemberian hibah tersebut awalnya diusulkan masyarakat atau lembaga yang sudah memenuhi ketentuan kepada SKPD terkait. Kemudian SKPD bersangkutan memverifikasi untuk diputuskan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna dibahas bersama DPRD.
 "Setelah diverifikasi diusulkan ke DPRD, kalau anggarannya tersedia ya kami setuju," ujarnya.

Harus dicari

Kemudian, menurut dia, jika diduga adanya pemberian hibah fiktif dinilai oleh penegak hukum, harus dicari siapa yang mengusulkan dan melakukan verifikasi terhadap penerima diduga fiktif itu.
 "DPRD tidak bisa mengawasi atau menyelidiki hingga ke penerima langsung satu per satu karena bukan penyidik. Kami hanya mekanismenya saja secara umum sudah sesuai ketentuan atau belum," katanya.
 Sebelumnya, tim penyidik Kejari Tangerang melakukan pengeledahan di kantor Biro Kesra Provinsi Banten, terkait pemberian dana hibah kepada sebuah yayasan yang diduga fiktif di wilayah Kabupaten Tangerang senilai Rp500 juta.
 Selain itu, BPK juga menyampaikan bahwa sebelum tahun 2012, Pemprov Banten telah memberikan hibah berupa barang kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan juga kepada masyarakat seluruhnya Rp1.130,94 miliar.
 Namun, Pemprov Banten belum dapat menyediakan dokumen hibah tersebut secara lengkap, khususnya hibah ke kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat mencatat aset yang diterima tersebut.
 Kepala BPK Perwakilan Banten, I Nyoman Wara mengatakan, terkait dengan hibah barang dari Pemprov Banten kepada kabupaten/kota, pemerintah pusat dan masyarakat senilai lebih Rp1 triliun, belum lengkap dokumennya. Hibah tersebut diberikan Pemprov Banten sebelum 2012 di antaranya Tahun 2010 dan 2011. (Ant)***

TERKAIT

- > Usut Tuntas Kasus Dana Hibah Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat Pemprov S... Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten 2011, Eks... Kasus YPI Sholatiyah Belum Ada Tersangka Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200 Juta Ma...



Kabar-Banten ePaper



SAFARI MALAM
 SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
 3 Cahay Tajah Hasi Plano
 TGL. 5.12.19 & 20 OCTOBER 2019
 COMING SOON TO THE THEATRE
 www.kemangraf.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

1:56 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/13550

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

MASIH TUNGGU HASIL BPKP, KEJAGUNG SABAR TANGANI KASUS DKP BANTEN

Thursday, 11 Jul 2013 | 20:32:22 WIB

SERANG, (KB)-
Kejaksanaan Agung (Kejagung) harus bersabar dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pembuatan delapan kapal kayu 30 GT senilai Rp12 miliar TA 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten. Untuk melimpahkan berkas kasus tersebut, Kejagung hingga kini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Belum limpah, kami masih menunggu hasil audit dari BPKP, belum keluar," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, dihubungi melalui ponselnya, Kamis (11/7).
Untung mengatakan, tim penyidik sudah menyelesaikan proses penyidikan dengan memeriksa lebih dari 20 orang. Termasuk tiga tersangka dan mantan Kepala DKP Banten, Suyitno.
"Semua sudah selesai diperiksa, ada sekitar 20-an saksi yang sudah diminta keterangan, termasuk mantan kepala dinasnya," ujarnya.

Bisa saja ditahan

Disinggung soal penahanan, Untung menjawab normatif. "Bisa saja dilakukan penahanan karena itu kewenangan penyidik selama itu dibutuhkan untuk memudahkan proses penyidikan. Kita lihat saja nanti," ungkapnya.

Sementara kuasa hukum AB dan M, Tb. Sukatma, SH mengatakan, kedua kliennya itu sudah diperiksa tapi sepengetahuannya hanya sebagai saksi.
"Saya tahunya keduanya diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu. Ya, tapi mungkin saja sudah sebagai tersangka," ujar Tb Sukatma, SH.
Sebagaimana diberitakan, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Mereka yaitu M (pejabat pembuat komitmen), dan AB selaku panitia lelang. Seorang lagi dari perusahaan pembuat kapal yakni A.
Dari hasil penyelidikan, ketiga tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan nilai kerugian mencapai Rp2 miliar dari total proyek Rp12 miliar. Diduga, dalam pembuatan kapal tersebut tidak sesuai spesifikasi.
Sebelumnya, kasus ini ditangani Kejati Banten. Namun, kemudian dilimpahkan ke Kejagung karena terkait sejumlah kasus serupa di beberapa daerah lainnya di Indonesia. (H-42)***

Dibaca : 164 kali

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/13537

KEJATI PERIKSA DUA TERSANGKA DUGAAN KORUPSI PILGUB BANTEN 2011

Wednesday, 10 Jul 2013 | 22:05:45 WIB

SERANG, (KB) - Kejati Banten tindak lanjuti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pencetakan surat suara Pilgub Banten 2011 senilai Rp4,5 miliar. Rabu kemarin, tersangka kasus tersebut, Erik menjalani pemeriksaan. Berdasarkan pantauan Kabar Banten, pemeriksaan berlangsung di ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten didampingi pengacaranya, Tb. Sukatma, SH. Tersangka diperiksa mulai pukul 10.00 WIB. Erik yang mengenakan pakaian safari hitam sempat keluar dari ruangan pemeriksaan menuju toilet sekitar pukul 14.00 WIB. Dia hanya mengacungkan jempol kepada para wartawan sambil tersenyum. Setelah itu, dia kembali ke ruang pemeriksaan. Penasihat hukum tersangka, Tb. Sukatma, SH, di sela-sela pemeriksaan mengatakan, kliennya diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. Pemeriksaan terkait dengan jabatannya sebagai mantan Sekretaris KPU Banten yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek pengadaan surat suara Pilgub Banten 2011. "Tadi diperiksa mulai pukul 10.00 WIB. Itu masih di BAP. Mungkin sampai pukul empat karena kan bulan puasa," kata Sukatma. Menyinggung mengenai peran tersangka, Sukatma menjelaskan, tersangka hanya menandatangani dokumen pembayaran. "Ya, tidak ada. Dia kan hanya tanda tangan (dokumen) pembayaran saja. Kan kalau tidak ditandatangani bisa dituntut," ungkapnya.

PPLP

Sementara itu, di hari yang sama penyidik juga memeriksa tersangka Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Banten, Tatang Hidayat, dalam kasus dugaan korupsi pada program Peningkatan Drainase Primair Kali Parung, Kota Serang senilai Rp5 miliar dari dana APBN 2012. Tatang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, yakni HJP dari PT Ciboleger. Pemeriksaan dilakukan dua jam, dimulai sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.15 WIB. Seusai pemeriksaan, saat ditanya wartawan, Tatang enggan memberikan keterangan. Dia hanya melambaikan tangan sambil berjalan keluar gedung Kejati. Kasi Penyidikan Eben Silalahi, SH membenarkan pemeriksaan kedua tersangka. Namun, dirinya enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal itu. "Ya, Tatang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Pemeriksaan sebagai tersangka belum, nanti lah sabar, ini dulu. Akan tetapi, bukan saya yang meriksa. Nanti tanyakan saja ke penyidiknya," katanya. (H-42)***

Dibaca : 155 kali

Kabar-Banten ePaper

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

Windows taskbar: kabar banten, kabar Banten Kritis..., kabar banten juli - ... 1:56 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/13454

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KEJARI-BPKP SALING TUNGGU, KASUS BETONISASI "MACET"

Monday, 08 Jul 2013 | 01:37:10 WIB

SERANG, (KB)- Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan betonisasi di Jalan Terate, Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang sepanjang 900 meter dari dana APBD 2011 senilai Rp3,5 miliar, hingga kini belum terlengkap. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Renwil Banten saling menunggu.

Kejari menunggu perhitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP. Sementara BPKP menyatakan masih menunggu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap PPK dan ahli teknis.

Selain itu, sejak perkara tersebut masuk tahap penyidikan pada November 2012, belum ada seorang pun tersangka yang ditetapkan Kejari Serang. Kejari menyatakan, tersangka akan terungkap setelah kerugian negara diketahui.

"Masih menunggu BPKP. Mas. Mau lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau sudah ada hasilnya dilanjutkan atau tidak, begitu," kata Kejari Serang, Sudarwadi, SH dihubungi melalui ponselnya, Minggu (7/7). Menurut dia, perkara tersebut "macet" pada BPKP. "Ya, itu kan macetnya di BPKP," ujarnya.

Namun, Kejari menepis bahwa tugas penyidik terhambat oleh lamanya proses perhitungan BPKP. "Tidak tidak seperti itu. Sudah ya, saya lagi sama keluarga, terima kasih," katanya.

Menunggu data

Sementara itu, Pengendali Teknis BPKP Renwil Banten, Murjanisayah mengatakan, penyidik Kejari Serang rencananya akan mengembangkan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap dua orang, yaitu PPK dari DSMTR Banten, dan ahli teknis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Perkembangan terakhir itu teman-teman dari penyidik akan mengembangkan BAP. Ternyata ada info baru, maknanya ada BAP tambahan. Ada dua, PPK dengan ahli. Untuk PPK ada BAP tambahan, sedangkan ahli BPPT memang jaks belum memeriksa. Jadi, kami nunggu data itu, kalau sudah ada baru kami hitung (kerugian negara-red). Kami tidak akan menghitung kalau belum ada kelengkapan data," kata Murjanisayah, dikonfirmasi melalui ponselnya, Minggu (7/7).

Ia mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah melakukan tahap klarifikasi satu kali terhadap masalah yang diungkap dalam BAP. "Akan tetapi, itu nanti kewenangannya penyidik untuk menginformasikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, lama tidaknya proses perhitungan BPKP terhadap kerugian negara dalam satu kasus tidak dapat ditentukan dari jenis kasusnya. Melainkan kelengkapan datanya.

"Lama tidaknya menghitung kerugian negara tidak bisa dilihat dari jenis kasusnya. Namun, bergantung pada kelengkapan datanya. Buat kami yg penting prosedur SOP kami lakukan, data-data terokupi, baru dikonsep," katanya.

Untuk diketahui, Kejari Serang mulai mengumpulkan data dan bahan keterangan kasus itu sejak Juni 2012, kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Pada Oktober 2012, perkara itu ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proyek pelebaran jalan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi, ada perbedaan antara dokumen dengan kenyataan di lapangan. Sejumlah pejabat sudah diminta keterangan. (H-42)™

Dibaca : 116 kali

Facebook Twitter Share Email Print

Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda

Nama

Jadwal Sholat Sumber: PKDU, Iqti : 24 Oct 2013

Sabuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Ihya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/13370

KABAR BANTEN.com
Grup Pikiran Rakyat

BKS
BANK BUKU ASHABU RI BANTEN
Perbankan - Digital Banking - Alkrowd.com

Menampilkan:

- PERBANKAN
- KESEHATAN
- KEPENDIDIKAN
- KEPERKAWINAN
- KEPERKERJAAN
- KEPERKAWINAN
- KEPERKERJAAN
- KEPERKAWINAN
- KEPERKERJAAN

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KASUS PENYELEWENGAN DANA HIBAH, KEJARI SIDIK YPI SHOLATIYAH

Friday, 05 Jul 2013 | 01:17:52 WIB

SERANG, (KB)-
Kejaksanaan Negeri (Kejan) Serang meningkatkan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Banten Rp600 juta kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sholatiyah ke tahap penyidikan. Hal ini menyusul menguatnya indikasi korupsi dalam perkara itu.

"Kasus YPI Sholatiyah sudah naik ke tahap penyidikan pada pekan lalu," kata Kasi Pidsus Kejari Serang, Triono Rahyudi, SH, Rabu (3/7).

Triono menjelaskan, dari rangkaian proses penyelidikan, tim penyidik sudah menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam kegiatan bantuan tersebut.

"Ya, peristiwanya sudah kami temukan, makanya ditingkatkan ke penyidikan. Selain itu, diindikasikan kerugian negara seperti yang dilaporkan pelapor yakni Rp600 juta," katanya.

Setelah ini, menurut diam pihaknya akan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah orang terkait dengan kasus itu dan memulai untuk mencari barang bukti guna mendukung proses penyidikan.

"Nanti akan memulai mencari barang bukti misalnya dokumen-dokumen terkait dan memeriksa saksi-saksi secara bertahap. Kami akan memeriksa untuk mengetahui dari mana kegiatan itu berasal, sumbernya dari mana, kemudian kegiatan penyaluran dananya," ungkapnya.

Mangkir
Triono mengungkapkan, sampai proses penyelidikan, mantan Ketua YPI Sholatiyah, ling Tufatul Ghorob juga belum memenuhi panggilan penyidik. "Di penyelidikan tidak hadir. Akan tetapi, nanti di penyidikan kami bisa upaya paksa," ujarnya.

Untuk diketahui, kasus dana hibah ini mencuat pascapemecatan yang dilakukan YPI Sholatiyah terhadap lima guru. Pemecatan dilakukan setelah para guru itu mempertanyakan soal penggunaan dana hibah yang diterima YPI Sholatiyah Rp600 juta dari Pemprov Banten tahun 2012. Pemecatan itu kemudian memunculkan reaksi dari murid dan guru lainnya. Mereka mendesak Ketua YPI Sholatiyah, ling Tufatul Ghorob mundur dari jabatannya. ling akhirnya mengundurkan diri. (H-42)***

TERKAIT

- Usut Tuntas Kasus Dana Hibah Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat Pemprov S...
- Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten 2011, Eks...
- Kasus YPI Sholatiyah Belum Ada Tersangka Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200 Juta Ma...



Kabar Banten ePaper



SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TOL. 5, 12, 19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO
www.danempaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

kabar banten | kabar Banten Kritis ... | kabar banten juli - ... | 1:55 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/13363

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

PEMROV RAIH WDP, TEMUAN HIBAH BARANG RP1,13 T

Friday, 05 Jul 2013 | 01:22:50 WIB

SERANG, (KE) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Pemprov Banten atas laporan keuangan tahun anggaran 2012. Salah satu penyebabnya, BPK menemukan hibah dalam bentuk barang senilai Rp1,13 triliun yang belum memiliki dokumen lengkap.

Demikian disampaikan Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna saat menyampaikan LHP BPK kepada DPRD Banten pada rapat paripurna, Kamis (4/7).

"Pada laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2012, BPK memberikan opini WDP, sama dengan tahun 2011," kata Firman.

Ia menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan Pemprov Banten kembali merah WDP. Yakni adanya temuan hibah dalam bentuk barang kepada pemkab/pemkot, instansi pusat dan masyarakat senilai Rp1,13 triliun yang belum lengkap dokumennya. Selain itu, penyebab lain dalam hal nilai persediaan yang dilaporkan Rp97,36 miliar, di antaranya di Dinas Kesehatan senilai Rp44, 60 miliar, hasil inventarisasi tidak dilengkapi dengan dokumen inventarisasi yang memadai sehingga BPK tidak memungkinkan melakukan prosedur pemeriksaan.

Temuan berulang

Agung juga melaporkan, 12 temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 10 temuan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern. Dari temuan tersebut, katanya, ada yang merupakan temuan berulang yaitu hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis/kontrak, kekurangan volume pekerjaan, biaya perjalanan dinas fiktif. Praktik-praktik yang menyebabkan pemalahan harga pengadaan barang dan jasa, belanja hibah belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban, penatausahaan kas dan verifikasi atas dokumen kelengkapan SPM dan SP2D belum sepenuhnya berjalan efektif serta penatausahaan aset belum sepenuhnya berjalan secara terb.

"Dengan masih terjadinya temuan berulang tersebut menandakan bahwa rekomendasi BPK belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemprov Banten," ujarnya.

Lebih lanjut hasil audit juga menyebutkan, sejak 2005 hingga 2012, BPK mendapatkan 344 temuan dengan 654 rekomendasi senilai Rp 51,3 miliar. Dari rekomendasi itu, katanya, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 427 rekomendasi dengan nilai Rp30,41 miliar, belum sesuai rekomendasi dalam proses tindak lanjut 101 rekomendasi senilai Rp8,959 miliar, dan belum ditindaklanjuti 120 rekomendasi senilai Rp3 miliar.

Belum tuntas

Menanggapi LHP BPK, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah menyatakan, terkait hibah barang pihaknya telah menindaklanjuti. Namun demikian, Atut mengakui, masih belum tuntas.

"Memang masih ada sisa yang belum dilengkapi dokumennya. Itu kan terjadi bukan hanya 2012 saja, tetapi juga tahun sebelumnya. Namun demikian, kami terus berupaya memaksimalkan kinerja," katanya.

Atut mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar hal ini bisa terselesaikan.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan BPK, Atut menyatakan, akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari.

Ketua DPRD Banten, Aeng Haerudin menyatakan, terkait LHP BPK ini, pimpinan DPRD akan segera merekomendasikan kepada komisi terkait untuk mengawal tindak lanjut SKPD terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Sanksi

Sementara itu, saat berlangsung paripurna, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 berdemo dengan menggelar teatrikal.

Dalam tuntutanannya, mahasiswa mendesak kepada DPRD mendorong aparat penegak hukum menjerat semua pihak yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

"DPRD juga harus mendesak pemprov memberikan sanksi tegas kepada semua pejabat yang terindikasi korupsi dan melakukan pelanggaran administratif. Bukan malah DPRD menggunakan temuan BPK itu sebagai barang dagangan politik kepada eksekutif," kata seorang demonstran. (H-32)---

Jadwal Sholat Sumber: PZDU, Iqti - 24 Oct 2013

Sabuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Haya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/13358

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KASUS LAHAN SMKN 1 CIRUAS, KEJARI DIMINTA UNGKAP OKNUM WAKIL RAKYAT

Thursday, 04 Jul 2013 | 01:32:37 WIB

SERANG, (KB)-
Komisi I DPRD Kabupaten Serang mendorong kejaksanaan mengungkap oknum anggota DPRD yang dinilai terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan SMKN 1 Ciruas, Kabupaten Serang. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya konflik internal di DPRD.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Muhajir mengatakan, dirinya mendorong pihak berwenang dalam hal ini kejaksanaan untuk mengungkap oknum anggota dewan yang terlibat dalam kasus SMKN 1 Ciruas.

"Saya baca di media, kasus itu katanya sudah masuk tahap penyelidikan, dalam hal ini Komisi I mengimbau pihak berwenang untuk segera mengungkap pelakunya, karena di media pernah dikatakan ada oknum anggota DPRD, supaya tidak menimbulkan konflik di internal," katanya, Selasa (2/7).

Muhajir mengatakan, Komisi I meminta kejaksanaan menjelaskan pelakunya, agar di antara anggota DPRD tidak saling bertanya. Jika memang pihak berwenang kesulitan, Komisi I dapat mendorong ke pihak lain untuk bergerak.

"Saya justru tidak begitu paham persoalan korupsinya. Setahu saya, anggaran pembebasan lahan SMKN itu awalnya Rp2 miliar, kemudian ditambah Rp1,5 miliar dari anggaran yang tadinya untuk SMKN Kramatwatu. Diungkap saja supaya tidak ada saling curiga dan bertanya-tanya di antara kami. Kalau memang benar proses, kalau tidak ya tutup," ungkapnya.

Selalu objektif

Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidsus Kejari Serang, Triono Rahyudi, Rabu (3/7) mengatakan, tim penyidik selalu kooperatif dan objektif dalam menangani perkara. Termasuk mengenai tuduhan pengunjuk rasa yang menyebutkan adanya oknum pimpinan dewan Kabupaten Serang yang diduga terkait kasus tersebut.

Ia menegaskan, semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut akan dimintai keterangan. "Pokoknya yang terkait dengan kasus itu kami periksa, dan ada hubungannya dengan kasus itu kami periksa," kata Triono.

Triono menjelaskan, saat ini penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan audit investigasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Lahan SMKN 1 Ciruas senilai Rp3,5 miliar di Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Audit investigasi itu merupakan rangkaian penyelidikan guna mengetahui peristiwa tindak pidana.

"Ya ini rangkaian penyelidikan. Nanti ketahuan apakah audit investigasi ini bisa dilanjutkan ke perhitungan keuangan negara atau tidak," katanya.

Sebagaimana diberitakan, oknum pimpinan dewas disebut-sebut terlibat oleh lembaga swadaya (LSM) saat berunjuk rasa di depan kantor Kejari Serang, Senin (27/5). Mereka mengaku punya bukti adanya keterlibatan tersebut. (H-40/H-42)***

TERKAIT

- > [Tangani Kasus SMKN 1 Ciruas, Kejari Serang Dinilai...](#)
- > [Kasus SMKN 1 Ciruas Bergantung BPKP](#)
- > [Cek Lokasi Lahan SMKN 1 Ciruas, Kejari Minta Bantu...](#)
- > [Kasus SMKN1 Masuk Pidsus](#)
- > [Kasus Pengadaan Lahan Masuk ke Penyelidikan](#)

Kabar-Banten ePaper

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/13314

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KASUS DUGAAN BANSOS FIKTIF, BIRO KESRA BANTEN DIGELEDAH

Wednesday, 03 Jul 2013 | 10:58:13 WIB

SERANG, (KB) - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa menggeledah ruangan Biro Kesra Setda Banten, Selasa (2/7). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan sosial (bansos) fiktif oleh Yayasan Al-Mukarobah di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Rp500 juta.

Berdasarkan pantauan Kabar Banten, sekitar belasan tim penyidik tiba di Setda Banten dengan menggunakan empat kendaraan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan penyidik menggeledah ruangan Biro Kesra, namun berlangsung hingga pukul 18.45 WIB. Terlihat para penyidik membawa sejumlah kardus berisi berkas-berkas.

Kasi Inteljen Kejari Tigaraksa, Musa, SH dikonfirmasi membenarkan penggeledahan tersebut terkait kasus bansos fiktif. "Ya, ini terkait dugaan korupsi APBD Banten untuk program peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana tahun 2012 di Kabupaten Tangerang dengan salah satu Yayasan Al-Mukarobah," ujar Musa, SH sesuai penggeledahan. Musa menjelaskan, penggeledahan hanya dilakukan di ruangan Biro Kesra. Namun, mengenai dokumen yang disita, Musa enggan menjawab karena hal itu sudah masuk pada materi penyidikan.

"Untuk dokumen apa saja itu kami belum bisa sampaikan. Ya, pokoknya berkaitan dengan kasus yang ditangani itu," ujarnya sambil berjalan menuju mobilnya.

Musa mengungkapkan, penggunaan dana bansos oleh Yayasan Al-Mukarobah itu diduga fiktif. "Ya, bisa dibayangkan seperti itu (fiktif-red)," tuturnya.

Penyidikan

Musa menambahkan, kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Namun, Musa masih enggan mengungkapkan tersangka dalam kasus tersebut. "Ya, ini sudah dik (penyidikan-red), makanya ada penggeledahan. Kalau tersangkanya itu nanti saja ya," katanya.

Menurut pantauan, saat penggeledahan berlangsung, sejumlah tim gabungan kejaksaan mengacak-acak ruangan Biro Kesra Pemprov Banten, mencari data dan dokumen yang tersimpan di laci meja dan lemari. Beberapa pegawai di kantor itu terkejut atas kedatangan personel dari lembaga adiyaksa tersebut. Para pegawai tampak panik dan mondar-mandir keluar-masuk ruangan. (H-42/Endang-Job/"KB")***

Dibaca : 156 kali

Facebook Twitter Share Email Print

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5, 12, 19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO THE GREAT SCREEN
www.kemendikparafat.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55